

# POLICY BRIEF

## “Memperkuat Satgas MBG: Kunci Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, Menuju Tata Kelola yang Transparan, Efisien dan Bertanggung jawab”

*disusun oleh*

Zaenal Zainuddin, S.Sos., M.Adm.Pemb  
Andi Dirga Putra, S.IP., M.Sc

*ditujukan kepada:*

Badan Gizi Nasional  
Lembaga Administrasi Negara

### Executive Summary

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kinerja Satuan Tugas (Satgas) MBG yang saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam tata kelola, koordinasi, dan akuntabilitas. Berdasarkan evaluasi awal, ditemukan beberapa permasalahan krusial: tumpang tindih wewenang, mekanisme pelaporan yang belum terstandar, serta kapasitas SDM yang tidak merata di daerah.

Rekomendasi utama yang diajukan meliputi: (1) restrukturisasi organisasi Satgas MBG dengan klarifikasi tugas dan tanggung jawab yang jelas; (2) penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi LAN RI; (3) implementasi sistem monitoring digital terintegrasi; dan (4) pembentukan mekanisme akuntabilitas berbasis kinerja. Implementasi rekomendasi ini diestimasi dapat meningkatkan efisiensi program dan mempercepat penurunan angka stunting di setiap tahunnya.

Manfaat langsung yang akan diperoleh meliputi transparansi pengelolaan anggaran, peningkatan cakupan penerima manfaat yang tepat sasaran, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap program. Aksi segera diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan Program MBG sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

# PENDAHULUAN

## Konteks Program MBG

Program MBG hadir sebagai bentuk komitmen nasional dalam memperbaiki kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik di berbagai jenjang pendidikan mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah serta anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama yang berada di kelompok berpenghasilan rendah.

Latar belakang pengusunan program MBG didorong oleh masih tingginya angka stunting, kurang gizi, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun capaian pembangunan kesehatan dan ketahanan pangan telah berkembang positif dalam dekade terakhir, disparitas antar daerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, serta pulau-pulau besar dengan daerah tertinggal yang masih menjadi tantangan utama. Data Kementerian Kesehatan dan BPS menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak balita masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, sementara akses terhadap pangan berkualitas tinggi masih terbatas bagi keluarga miskin.

MBG dirancang sebagai program lintas sektor yang tidak hanya menyediakan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengintegrasikan aspek edukasi gizi, pemantauan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pertanian dan UMKM setempat. Dengan pendekatan holistik, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan malnutrisi secara berkelanjutan.



Program ini juga mencerminkan visi pemerintahan baru dalam mewujudkan Indonesia Emas melalui investasi sumber daya manusia unggul sejak usia dini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu terobosan kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Dengan dukungan anggaran negara yang signifikan, program ini tidak hanya bergantung pada alokasi fiskal pusat, tetapi juga dibangun di atas fondasi kolaborasi multisektor yang luas. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak implementasi di lapangan, memastikan distribusi dan penyesuaian program sesuai dengan konteks lokal. TNI dan Polri turut berperan dalam logistik, keamanan distribusi, serta pendataan penerima manfaat di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Tidak kalah penting, lembaga keagamaan seperti pesantren, masjid, gereja, dan wihara diberdayakan sebagai mitra distribusi dan penyebaran informasi, memperkuat legitimasi sosial serta aksesibilitas program di tengah masyarakat. Sementara itu, sektor swasta terlibat melalui kemitraan publik-swasta (PPP), baik dalam bentuk penyediaan makanan bergizi, transportasi, maupun inovasi teknologi informasi untuk sistem monitoring berbasis digital.

Kerangka kerja kolaboratif ini menjadikan MBG bukan sekadar program pangan, melainkan ekosistem kesejahteraan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan cakupan nasional yang menjangkau puluhan juta penerima mulai dari anak usia dini, pelajar, ibu hamil, hingga lansia prasejahtera MBG berdiri sebagai intervensi publik dengan jangkauan terluas, mencerminkan transformasi besar dalam pendekatan perlindungan sosial di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya merupakan perwujudan komitmen kebijakan, tetapi juga didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi secara nasional. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus Program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024. Satgas ini dirancang dengan struktur multistakeholder yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga terkait, mencerminkan sifat program MBG yang lintas sektor dan berbasis kolaborasi. Di tingkat pusat, koordinasi utama berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara di tingkat daerah, Satgas MBG dibentuk hingga ke provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan penyerapan yang adaptif terhadap kondisi lokal serta akuntabilitas dalam distribusi dan pemantauan program.

### **Akar Masalah Tata Kelola**

Badan Gizi Nasional memiliki tujuh fungsi utama yang saling berkaitan, yang meliputi koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi internal, pengelolaan aset negara, dukungan substantif, pengawasan, dan tugas lain dari presiden. Seiring waktu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh ([Kemenkes, 2025](#)), teridentifikasi empat masalah utama dalam tata kelola Satgas MBG:

1. Tumpang Tindih Wewenang: Satgas daerah melaporkan adanya overlap tugas antar instansi
2. Kapasitas SDM Tidak Merata: personel Satgas belum memiliki pelatihan tata kelola program
3. Sistem Pelaporan Belum Terintegrasi: laporan daerah terlambat atau tidak lengkap
4. Mekanisme Akuntabilitas Lemah: Belum ada indikator kinerja yang terstandar secara nasional

## Pemangku Kepentingan Terkait

Dalam upaya mengatasi isu stunting dan ketahanan pangan di Indonesia, pemangku kepentingan yang terlibat mencakup berbagai lapisan yang saling terkait untuk memastikan implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), berperan utama dalam merumuskan kebijakan nasional, alokasi anggaran, pemantauan data, dan pelatihan sumber daya manusia. Sementara itu, Pemerintah Daerah melalui Satgas MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bertanggung jawab atas adaptasi program ke tingkat lokal, termasuk distribusi dan koordinasi lapangan. Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya petugas lapangan dan koordinator program, menjadi ujung tombak eksekusi, memastikan penerimaan dan distribusi makanan bergizi mencapai target. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama, beserta organisasi masyarakat sipil, turut berpartisipasi melalui umpan balik, advokasi, dan pengawasan untuk menjaga akuntabilitas. Terakhir, sektor swasta sebagai mitra penyediaan makanan bergizi memberikan dukungan teknis dan logistik, seperti inovasi produk sehat dan rantai pasok yang berkelanjutan, sehingga seluruh elemen ini bersinergi mengurangi disparitas gizi dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

## DESKRIPSI MASALAH

Program MBG menghadapi tantangan kompleks dalam tata kelola yang memengaruhi efektivitas implementasi. (MenPAN-RB, 2025) menunjukkan bahwa Satgas daerah mengalami kesulitan dalam koordinasi lintas instansi, sementara (Kemenkes, 2025) melaporkan adanya gap kompetensi sebesar antar personel Satgas di berbagai wilayah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai upaya besar meningkatkan kesejahteraan anak dan kelompok rentan menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam pelaksanaannya, terutama di sisi tata kelola. Banyak satuan tugas daerah mengalami kesulitan dalam menjalin koordinasi antar instansi terkait, sehingga sinergi antar lembaga seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada pengambilan keputusan yang lambat, pembagian tugas yang tidak jelas, dan hambatan dalam penyaluran logistik serta pelaporan hasil kegiatan.

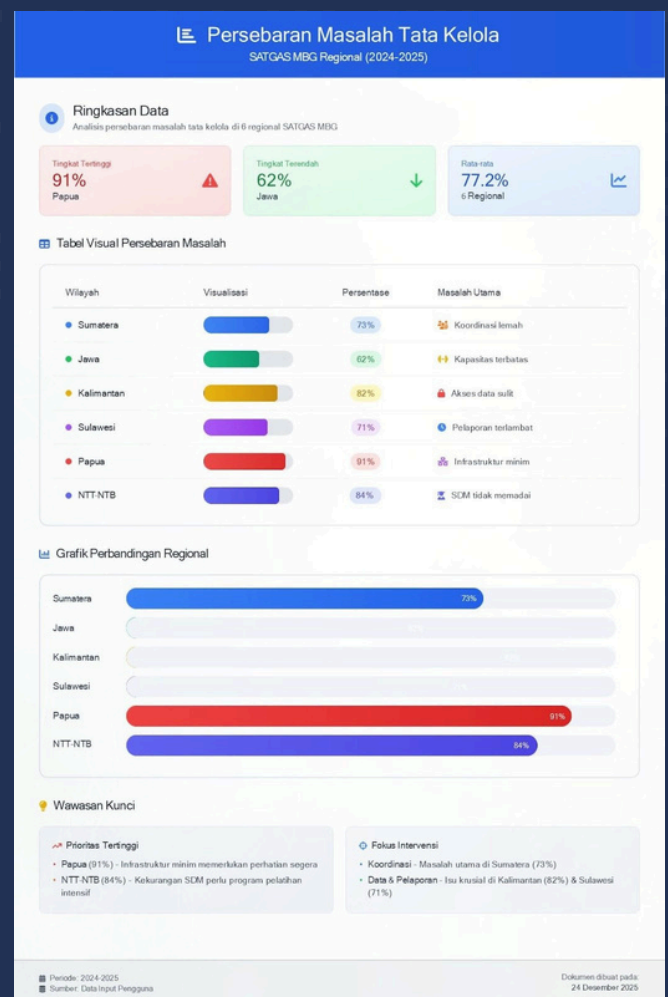
Selain itu, terdapat ketimpangan dalam kapasitas sumber daya manusia di berbagai wilayah. Banyak personel Satgas MBG belum memiliki bekal yang cukup dalam aspek teknis, manajerial, maupun operasional, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pelatihan dan bimbingan teknis. Keberagaman kondisi daerah—baik dari segi geografis, infrastruktur, maupun kapasitas pemerintah daerah—menyebabkan implementasi program berjalan tidak seragam. Beberapa dapur sentral mengalami kendala dalam menjaga konsistensi kualitas makanan, jadwal distribusi, dan pemetaan penerima manfaat yang tepat sasaran.

Kurangnya panduan pelaksanaan yang baku dan sistem monitoring yang terintegrasi juga memperbesar risiko penyimpangan serta tumpang tindih kegiatan. Meskipun struktur pelaksana seperti KPPG dan SPPG telah dibentuk untuk mengatur pengawasan dan operasional di lapangan, penguatan peran dan alur tanggung jawab keduanya masih perlu diperjelas. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pencapaian tujuan jangka panjang program, yaitu terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif melalui nutrisi yang terjamin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan anak dan kelompok rentan di Indonesia, namun tantangan dalam tata kelola menjadi penghambat utama efektivitas implementasi. Dampak dari analisis mendalam terhadap isu ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain:

- **Dampak Operasional:** Ketidakharmonisan koordinasi lintas instansi (seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial) menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat, distribusi logistik terhambat, dan pelaporan tidak tepat waktu. Hal ini mengurangi efisiensi dan responsivitas program di lapangan.
- **Dampak Kapasitas SDM:** Adanya gap kompetensi antar personel Satgas MBG di berbagai daerah—khususnya dalam aspek teknis, manajerial, dan operasional—mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan, seperti kualitas makanan, jadwal distribusi, dan akurasi sasaran penerima. Wilayah terpencil dengan akses pelatihan terbatas paling rentan terhadap kegagalan implementasi.
- **Dampak Tata Kelola dan Akuntabilitas:** Kurangnya panduan baku dan sistem monitoring yang terintegrasi meningkatkan risiko penyimpangan, duplikasi kegiatan, serta lemahnya mekanisme evaluasi. Lembaga seperti KPPG dan SPPG belum berfungsi optimal karena alur tanggung jawab yang kabur.
- **Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik:** Jika tidak diatasi, persoalan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, sehingga mengancam keberlanjutan program dan tujuan jangka panjangnya—yaitu terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

## Infografis Temuan Kunci Evaluasi Satgas MBG



# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan
1. Restrukturisasi Penuh Satgas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur lebih jelas</li> <li>• Eliminasi tumpang tindih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resisten perubahan tinggi</li> <li>• Biaya restrukturisasi besar</li> </ul>
2. Penguatan Kapasitas Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusi jangka Panjang</li> <li>• Peningkatan kinerja signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• implementasi Panjang</li> <li>• Butuh komitmen berkelanjutan</li> </ul>
3. Digitalisasi Sistem Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi tinggi</li> <li>• Transparansi terjamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butuh infrastruktur memadai dan Literasi digital</li> </ul>
4. Hibridisasi (Kapasitas + Digital)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusi komprehensif</li> <li>• Dampak berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompleksitas tinggi</li> <li>• Koordinasi ekstra hati-hati</li> </ul>

## Analisis Implikasi

Transformasi organisasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua. Setiap alternatif yang disiapkan baik itu restrukturisasi penuh, penguatan kapasitas berbasis kompetensi, digitalisasi sistem tata kelola, maupun hibridisasi antara kapasitas dan teknologi mencerminkan pendekatan yang unik dengan latar belakang kebutuhan, tantangan, serta tujuan jangka pendek dan panjang yang berbeda. Restrukturisasi penuh menawarkan kejelasan struktur dan penghapusan tumpang tindih yang mengganggu.

Di sisi lain, penguatan kapasitas berbasis kompetensi menekankan pada peningkatan kualitas manusia sebagai fondasi utama, yang menghasilkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, meskipun membutuhkan waktu, komitmen, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Digitalisasi sistem tata kelola hadir sebagai solusi untuk efisiensi dan transparansi, dengan kemampuan mempercepat proses dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang memadai. Pada akhirnya, hibridisasi yang menggabungkan keduanya menjadi jawaban paling holistik: menjadikan SDM yang kompeten menjadi mitra aktif dalam sistem digital, menciptakan kolaborasi yang sinergis dan dampak yang berkelanjutan. Namun, kompleksitasnya juga tinggi, sehingga memerlukan koordinasi yang cermat dan pendekatan bertahap.

Dalam praktiknya, tidak ada jalan yang mutlak benar, keputusan harus didasarkan pada kondisi nyata satgas saat ini: tingkat kematangan organisasi, kesiapan teknologi, kultur kerja, serta kebutuhan strategis jangka waktu tertentu. Jika kondisi mendesak dan krisis struktural muncul, restrukturisasi penuh mungkin menjadi pilihan terbaik, meskipun dengan risiko tinggi. Jika tujuannya adalah perubahan permanen dan kualitas kerja yang mendalam, maka penguatan kapasitas harus menjadi fondasi utama. Sementara itu, jika efisiensi dan transparansi menjadi prioritas utama dengan dukungan teknologi yang ada, digitalisasi bisa menjadi lompatan besar. Namun, untuk perubahan yang benar-benar berkelanjutan dan berdampak luas, pendekatan hibrida yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas manusia dengan sistem digital adalah jalan yang paling bijak dan realistis.

Alternatif Hibridisasi menawarkan solusi paling komprehensif dengan memadukan peningkatan kapasitas SDM. Meskipun memerlukan investasi lebih besar, dampak jangka panjang terhadap efektivitas program jauh lebih signifikan dibandingkan pendekatan parsial.

## Rekomendasi Kebijakan

- Pertama, untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG), perlu dilakukan restrukturisasi organisasi yang jelas dan terukur. Hal ini dimulai dengan merevisi Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur Satgas MBG, agar pembagian tugas antarlembaga dan tingkatan wilayah menjadi lebih tegas dan tidak tumpang tindih. Dengan membentuk cluster fungsional khusus meliputi Program, Keuangan, Monitoring, dan SDM setiap unit dapat bekerja secara spesifik sesuai kompetensi, didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku di semua tingkatan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun memerlukan masa adaptasi untuk mengatasi resistensi dari struktur lama
- Kedua, peningkatan kapasitas SDM menjadi pilar krusial dalam transformasi ini, dengan peran sentral Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) sebagai motor pengembangan kompetensi. LAN RI perlu menyusun kurikulum pelatihan nasional yang berfokus pada tata kelola program publik, yang kemudian diimplementasikan secara bertahap kepada personel Satgas di seluruh Indonesia. Program pelatihan ini akan dilengkapi sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan didukung oleh pembentukan pusat pelatihan regional di lima kota besar, memastikan akses merata dan efisien. Meskipun investasi awal cukup besar dan berpotensi mengganggu produktivitas sementara selama pelatihan, dampak jangka panjangnya adalah terciptanya jaringan pelaksana yang profesional, terampil, dan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal secara responsive
- Ketiga, untuk membangun budaya kinerja yang berorientasi hasil perlu diterapkan mekanisme akuntabilitas berbasis kinerja. Hal ini mencakup penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan dampak program. Sistem reward and punishment yang adil dan konsisten, serta evaluasi kinerja triwulanan yang dilakukan secara independen oleh LAN RI, akan meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Selain itu, kewajiban publikasi laporan kinerja secara terbuka akan memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Meskipun ada risiko manipulasi indikator, hal ini dapat dicegah dengan merancang KPI yang holistik dan seimbang antara aspek kuantitatif dan kualitatif

## DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes. (2025, Oktober). Kemenkes Perketat Pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-perketat-pengawasan-dalam-program-makan-bergizi-gratis>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, Desember). Optimalkan Program MBG, Pemerintah Perkuat Tata Kelola BGN. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/optimalkan-program-mbg-pemerintah-perkuat-tata-kelola-bgn>
- Kemenkes. (2025, September). Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG Keselamatan Anak Jadi Prioritas. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/pemerintah-perkuat-tata-kelola-program-mbg-keselamatan-anak-jadi-prioritas>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024. Jakarta: BPS.
- Lembaga Administrasi Negara. (2025). Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Program Prioritas Nasional. Jakarta: LAN RI.
- World Bank. (2024). Nutrition-Sensitive Social Protection: Lessons from East Asia. Washington: World Bank.
- United Nations. (2023). Sustainable Development Goals Report 2023. New York: UN.
- <https://labkesmasbatam.id/2025/05/28/prevalensi-stunting-turun-jadi-198-di-2024-melebihi-target-nasional/>